

Gerakan Ciliwung Bersih sebagai Praktik Sosial Kewarganegaraan Ekologis

Ahmad Tarmiji Alkhudri ^{a, 1*}, Prima Yustitia Nurul Islami ^{a, 2}, Suyuti ^{a, 3}

^a Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

¹ tarmiji@unj.ac.id *

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 20 Oktober 2025;

Revised: 18 November 2025;

Accepted: 24 Desember 2025.

Kata kata kunci:

Gerakan Ciliwung Bersih;
Kewarganegaraan

Ekologis;

Praktik Sosial;

Civic Engagement;

Keadilan Ekologis

: ABSTRAK

Persoalan Sungai Ciliwung berupa pencemaran, sampah, perubahan penggunaan lahan, dan banjir merupakan persoalan ekologis sekaligus persoalan kewarganegaraan karena dampaknya menyentuh ruang hidup bersama. Konsep utama yang digunakan ialah *ecological citizenship*. Penelitian bertujuan menganalisis GCB sebagai jejaring kewarganegaraan ekologis, mengidentifikasi bentuk praktik ekologis sehari-hari, dan menjelaskan pelebagaan gerakan pada relasi *top-down* dan *bottom-up*. Penelitian menggunakan paradigma interpretif, pendekatan kualitatif, dan studi kasus tunggal. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara semi-terstruktur terhadap 13 informan yang dipilih secara *purposive* dan dikembangkan melalui *snowball sampling*. Analisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña serta triangulasi sumber dan teknik. Hasil menunjukkan bahwa kewarganegaraan ekologis hadir melalui kebiasaan pendidikan lingkungan, pengelolaan sampah, konservasi, seni-budaya, ekowisata, dan mitigasi banjir. Pelebagaan berlangsung melalui lima tahap dan menghasilkan jaringan kewargaan ekologis berbasis komunitas. Temuan merumuskan *ecological citizenship* sebagai praktik sosial sehari-hari.

ABSTRACT

Keywords:

Gerakan Ciliwung Bersih;
ecological citizenship;

social practice;

civic engagement;

ecological justice

Gerakan Ciliwung Bersih (GCB) as a Social Practice of Ecological Citizenship. Pollution, waste, land-use change, and flooding in the Ciliwung River are ecological problems as well as citizenship problems because their consequences affect shared living spaces. The main concept used is ecological citizenship. The study aims to analyze GCB as an ecological citizenship network, identify forms of everyday ecological practices, and explain the institutionalization of the movement through top-down and bottom-up relations. The study employs an interpretive paradigm, qualitative approach, and single-case study. Data were collected through literature review, observation, and semi-structured interviews with 13 informants selected purposively and developed through snowball sampling. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, supported by source and technique triangulation. The findings show that ecological citizenship is practiced through environmental education, waste management, conservation, arts and culture, ecotourism, and flood mitigation. Institutionalization developed through five stages and produced a community-based ecological citizenship network. The findings conceptualize ecological citizenship as an everyday social practice.

Copyright © 2025 (Ahmad Tarmiji Alkhudri, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Alkhudri, A. T., Islami, P. Y. N., & Suyuti, S. (2025). Gerakan Ciliwung Bersih sebagai Praktik Sosial Kewarganegaraan Ekologis. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(12), 421–432. <https://doi.org/10.56393/decive.v5i12.4790>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Persoalan lingkungan merupakan persoalan sosial sekaligus persoalan kewarganegaraan karena kerusakan ekologis memengaruhi kesehatan, keselamatan, penghidupan, serta ruang hidup warga. *Civic engagement* membantu menjelaskan keterlibatan warga dalam persoalan bersama (Adler & Goggin, 2005), sedangkan sosiologi kewarganegaraan melihat kewarganegaraan sebagai praktik yang dibentuk melalui tindakan, relasi sosial, dan klaim atas kepentingan publik (Westheimer & Kahne, 2004; Isin, 2008). Namun, persoalan ekologis membutuhkan pembacaan yang lebih khusus karena dampak tindakan seseorang dapat melampaui batas rumah, komunitas, wilayah administratif, bahkan generasi.

Konsep *ecological citizenship* dari Dobson (2003) memberi landasan bagi pembacaan tersebut. Kewarganegaraan ekologis berangkat dari kewajiban, bukan hak semata; kewajiban itu dapat bersifat non-resiprokal karena seseorang bertanggung jawab atas dampak ekologis tindakannya terhadap orang lain yang tidak selalu dapat memberi balasan. Ruang politiknya tidak berhenti pada negara atau kota, tetapi mengikuti ecological footprint, sedangkan ranah privat dan publik sama-sama menjadi ruang tindakan warga. Kerangka tersebut menggeser pertanyaan dari 'apa yang diperoleh warga?' menjadi 'dampak apa yang ditimbulkan tindakan warga dan tanggung jawab apa yang mengikuti dampak tersebut?' (Dobson, 2003, 2006). Jagers (2009) menunjukkan bahwa kewarganegaraan ekologis perlu dibaca melalui kesediaan bertindak, sedangkan Schlosberg (2007) menghubungkan keadilan ekologis pada distribusi risiko, pengakuan, kemampuan, dan partisipasi.

Sungai Ciliwung merupakan konteks penting bagi pembacaan hubungan lingkungan dan kewarganegaraan. Sungai sepanjang sekitar 120 km dan DAS sekitar 387 km² melintasi Bogor, Depok, dan Jakarta. Perubahan penggunaan lahan, pertumbuhan permukiman, aktivitas ekonomi, pencemaran, sampah, erosi, longsor, serta banjir memberi tekanan pada ekosistem DAS Ciliwung (Indiarto, 2000; KLH, 2012; Savitri, 2024). Puspitasari et al. (2016) menemukan persoalan kualitas air Ciliwung, sedangkan Pratama dan Constantine (2023) menunjukkan hubungan perubahan penggunaan lahan dan kontaminasi organik. Cordova et al. (2024) juga menemukan persoalan sampah makro pada bantaran sungai. Kondisi tersebut membuat pelestarian Ciliwung menjadi persoalan publik dan lintas komunitas yang melampaui batas administratif (Mohammad & Dhestyana, 2022).

Karakter lintas wilayah tersebut membuat Ciliwung menjadi arena perjumpaan antara kewarganegaraan lokal dan persoalan ekologis lintas ruang. Clegg et al. (2023) menunjukkan persoalan koordinasi tata kelola banjir karena kewenangan tersebar pada beberapa unit pemerintahan, sementara persoalan ekologis berlangsung pada satu kesatuan DAS. Alfian dan Vitaloka (2018) juga menunjukkan kebutuhan kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan sumber daya air Ciliwung. Dalam kondisi semacam itu, *ecological citizenship* tidak cukup dipahami sebagai kepatuhan terhadap kebijakan. Ia hadir ketika warga menghubungkan kebiasaan sehari-hari, tanggung jawab terhadap ruang bersama, tindakan kolektif, dan kepedulian terhadap warga yang berada di segmen sungai lain.

Gerakan Ciliwung Bersih (GCB) menyediakan konteks empiris dalam melihat persoalan tersebut. GCB berdiri pada 1989 melalui keterlibatan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, komunitas peduli lingkungan, dan pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap Ciliwung (Moerpratomo, 2022). Dalam perkembangannya, GCB menjadi rumah bersama bagi 36 Komunitas Peduli Ciliwung (KPC) dari kawasan hulu hingga hilir. Kegiatan KPC berlangsung pada segmen sungai yang berbeda, sementara GCB menghubungkan kegiatan melalui jaringan. Posisi tersebut penting bagi studi kewarganegaraan karena memperlihatkan hubungan antara tindakan lokal dan kepentingan ekologis yang lebih luas.

Penelitian terdahulu telah membahas gerakan penyelamatan sungai, komunitas, komunikasi lingkungan, partisipasi, dan jejaring stakeholder di Ciliwung (Ramandhana, 2012; Maring et al., 2015; Rahmawati, 2019; Ramadhani, 2021; Hidayaturahmi et al., 2023, 2024). Kajian tersebut memberi dasar empiris mengenai aktor dan bentuk gerakan, tetapi belum banyak menjelaskan bagaimana tindakan ekologis sehari-hari diproduksi sebagai praktik kewarganegaraan, bagaimana tanggung jawab ekologis

bergerak dari ranah privat menuju ruang publik, serta bagaimana praktik tersebut menjadi kelembagaan melalui jejaring lintas hulu, tengah, dan hilir.

Atas dasar celah tersebut, penelitian ini menggunakan *ecological citizenship* sebagai kerangka utama, *civic engagement* sebagai konsep pendukung, dan teori gerakan sosial serta *collaborative governance* untuk membaca tindakan kolektif dan hubungan antaraktor (Dobson, 2003; Adler & Goggin, 2005; Della Porta & Diani, 2006; Triwibowo & Sujatmiko, 2006; Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012). Penelitian juga menggunakan gagasan *acts of citizenship* untuk melihat tindakan warga sebagai praktik yang membentuk posisi kewarganegaraan melalui tindakan nyata (Isin, 2008). Penelitian bertujuan: (1) menganalisis GCB sebagai arena kewarganegaraan ekologis berbasis jejaring; (2) mengidentifikasi dimensi praktik kewarganegaraan ekologis dalam kehidupan sehari-hari, terutama etika ekologis, tindakan kolektif, dan transformasi ruang hidup; serta (3) menjelaskan proses pelebagaan GCB melalui hubungan top-down dan bottom-up, termasuk cara jejaring komunitas merespons perbedaan kondisi hulu, tengah, dan hilir. Secara teoretis, penelitian ini mengusulkan bahwa *ecological citizenship* pada konteks lokal Indonesia dapat dibaca sebagai praktik sosial sehari-hari yang menghubungkan tanggung jawab ekologis, tindakan kolektif, dan perubahan ruang hidup.

Metode

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif pendekatan kualitatif, dan studi kasus tunggal (Denzin & Lincoln, 2005; Creswell, 2007; Yin, 2013; Patton, 2015). Penelitian dilakukan di Sekretariat Gerakan Ciliwung Bersih (GCB), Jl. Penjernihan, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan unit analisis gerakan komunitas GCB. Informan berjumlah 13 orang yang terdiri atas Ketua Umum dan pengurus GCB, anggota Komunitas Peduli Ciliwung (KPC), relawan, aktivis lingkungan, serta tokoh masyarakat yang dipilih secara *purposive* dan dikembangkan melalui *snowball sampling*. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi, wawancara semi-terstruktur, serta telaah dokumen organisasi dan catatan kegiatan. Wawancara berfokus pada sejarah GCB, praktik ekologis sehari-hari, pembagian peran, hubungan antar-KPC, relasi warga dan pemerintah, tindakan kolektif, perubahan ruang hidup, serta proses pelebagaan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) melalui pengumpulan, kondensasi, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik, sedangkan reflektivitas peneliti dilakukan melalui pemeriksaan catatan lapangan, perbandingan antarsumber, dan diskusi interpretasi untuk mengurangi pembacaan sepihak.

Hasil dan Pembahasan

Sungai Ciliwung sepanjang sekitar 120 km merupakan ruang ekologis sekaligus ruang sosial yang menghubungkan wilayah hulu, tengah, dan hilir, dari Bogor hingga Jakarta (Wasis & Erizal, 2013). Tekanan berupa pencemaran, sampah, perubahan penggunaan lahan, pertumbuhan permukiman, dan aktivitas ekonomi menjadikan sungai tidak berhenti pada kualitas air. Pratama dan Constantine (2023) menemukan hubungan antara perubahan penggunaan lahan dan kontaminasi organik di Ciliwung, sedangkan Cordova et al. (2024) menunjukkan persoalan sampah makro pada bantaran Sungai, bahkan memperkirakan sekitar 4,95–18,82 ton sampah berpotensi terbawa dari bantaran Ciliwung menuju laut. Temuan tersebut memberi dasar untuk membaca tindakan warga sebagai persoalan kewarganegaraan: pilihan pengelolaan sampah, penggunaan ruang, dan respons terhadap risiko sungai memiliki konsekuensi bagi warga lain serta ekosistem yang berada di luar lokasi tindakan.

Persoalan tersebut berhadapan pada batas administratif. Clegg et al. (2023) menunjukkan persoalan koordinasi dalam tata kelola banjir Ciliwung karena kewenangan tersebar pada berbagai unit administrasi pemerintahan, sedangkan persoalan ekologis berlangsung pada satu kesatuan ekosistem DAS. Alfian dan Vitaloka (2018) juga menunjukkan kebutuhan kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan sumber daya air Ciliwung sebab kepentingan administratif dan kepentingan ekologis tidak

selalu berada pada ruang yang sama. Kondisi tersebut memperlihatkan jarak antara ruang administrasi dan ruang ekologis. Dalam perspektif Dobson (2003), kewarganegaraan ekologis bekerja pada ruang dampak, bukan semata ruang administratif. GCB menjadi menarik karena jejaringnya bergerak mengikuti ruang sosial sungai sekaligus menghubungkan aktor yang bekerja pada batas wilayah berbeda.

GCB berdiri pada 1989 atas prakarsa unsur pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, komunitas peduli lingkungan, dan pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap Ciliwung. Sejak awal, GCB berperan sebagai fasilitator, koordinator, pembina, pembimbing, dan penghubung berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kelestarian Ciliwung (Moerpratomo, 2022). Peran tersebut berkembang menjadi rumah bersama bagi 36 Komunitas Peduli Ciliwung (KPC). Temuan ini memperlihatkan dua sumber pembentukan kewarganegaraan ekologis yakni prakarsa kelembagaan dari atas yang menyediakan ruang organisasi dan tindakan komunitas dari bawah yang mengisi ruang tersebut melalui praktik sehari-hari. Oleh karena itu, GCB lebih tepat dipahami sebagai arena pembentukan kewarganegaraan ekologis daripada sekadar organisasi pelaksana program.



Gambar 1. Gedung Sekretariat GCB (Nampak Depan dan Belakang)

Perjalanan GCB memperlihatkan perubahan dari organisasi lintas sektor menuju jaringan komunitas. Revitalisasi pada 2012 kemudian diarahkan pada penyatuan berbagai upaya pelestarian Ciliwung yang sebelumnya berjalan secara terpisah. GCB memosisikan diri sebagai rumah bersama bagi komunitas peduli Ciliwung, sehingga identitas gerakan tidak bergantung pada satu kelompok atau satu wilayah melainkan praktik berulang yang menghubungkan kepedulian, tanggung jawab, dan kepentingan publik. Dari sudut pandang sosiologi kewarganegaraan, perubahan tersebut penting karena ruang partisipasi bergeser dari kepedulian individual menuju keterlibatan kolektif yang memiliki tujuan publik dan agenda bersama.

Keberadaan 36 KPC yang tersebar dari hulu hingga hilir memperlihatkan bentuk kewarganegaraan yang berakar pada ruang lokal. Komunitas tersebut memiliki segmen, kegiatan, bentuk aksi, dan karakter sosial masing-masing, tetapi bertemu pada kepentingan menjaga Ciliwung. Daftar tersebut antara lain Komunitas Ciliwung Puncak, Kelompok Tani Cijulang Asri, Komunitas Peduli Ciliwung Bogor, Komunitas Ciliwung Depok, Ciliwung Institute, Komunitas Ciliwung Lenteng Agung, Komunitas Ciliwung Condet, Sahabat Ciliwung, Mat Peci, Jawara Peci, KPC Rawajati, Jakarta Green Monster, serta berbagai kelompok lainnya (Hidayaturahmi et al., 2024 dan wawancara dengan Eko Feriyanto, Pengurus GCB dan Ketua Arya Giri). Keragaman tersebut penting karena *ecological citizenship* tidak menuntut satu bentuk perilaku. Akan tetapi, yang menjadi dasar adalah orientasi tanggung jawab terhadap dampak ekologis dan kehidupan bersama. Dalam istilah Dobson (2003), ruang kewargaan ditentukan oleh hubungan ekologis, bukan hanya batas wilayah.

GCB tidak menjadi pelaksana tunggal seluruh kegiatan. GCB berfungsi sebagai simpul penghubung, sedangkan KPC menjalankan aksi sesuai kondisi segmen masing-masing. Maring et al.

(2015) menunjukkan pentingnya relasi sosial, identitas kelompok, dan hubungan lokal pada komunitas bantaran Ciliwung. Temuan GCB memperlihatkan hubungan serupa, tetapi bergerak pada skala lebih luas: identitas lokal tetap dipertahankan, sementara agenda ekologis dirajut menjadi kepentingan bersama. Pola tersebut memperlihatkan bentuk kewarganegaraan ekologis yang bersifat berjejaring.

Afiliasi GCB memperluas jejaring dan ruang perjumpaan antara komunitas, pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Hubungan tersebut menjadi sumber pengetahuan, fasilitas, pendampingan, dan dukungan kegiatan. Namun, keluasan jejaring tidak dengan sendirinya berarti kesetaraan partisipasi. Persoalan distribusi sumber daya dan pengetahuan tetap perlu dibaca sebagai bagian dari kualitas kewarganegaraan ekologis (Ishihara & Pascual, 2009; Puspita, Suharjito, & Supriyanto, 2024).

Afiliasi tersebut memperlihatkan bahwa GCB berada di antara dua arah pembentukan gerakan. Pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha menyediakan sumber daya serta ruang kelembagaan, sedangkan KPC membawa pengetahuan lokal dan pengalaman lapangan. Hubungan itu dapat menjadi kolaborasi ketika pengetahuan lokal memperoleh posisi dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, jika sumber daya hanya bergerak satu arah, hubungan warga–lembaga dapat kembali menjadi *pola top-down*. Karena itu, *civic engagement* dalam GCB perlu dibaca sebagai relasi yang terus dinegosiasikan antara sumber daya institusional dan otonomi komunitas.

Tabel 1. Afiliasi Komunitas GCB

No	Instansi Pemerintah	Perusahaan	Perguruan Tinggi
1.	Kementerian Lingkungan Hidup	PAM Jaya	Universitas UI
2.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PT. PLN (Persero)	IPB University
3.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	PT Indonesia Power	Universitas Bakrie
4.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	Institut Teknologi PLN
5.	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR	Startup comestoarra.com – bidang <i>supply-value chain</i> energi baru dan terbarukan	Universitas Gunadarma
6.	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK	PT.K Line Indonesia	Universitas Muhammadiyah Jakarta
7.	Bappeda DKI Jakarta	PT. Mayora	Universitas Negeri Jakarta
8.	Badan Air Dinas Lingkungan Hidup, DKI Jakarta	PT. Palyja	Binus University
9.	Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta	PT. Aetra	
10.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta	Indonesia Global Compact Network (IGCN)	
11.	Dinas Kesehatan DKI Jakarta	BNI 46	

Program GCB dapat dibaca sebagai praktik etika ekologis ketika tindakan warga diarahkan pada pengurangan dampak ekologis dan perlindungan ruang hidup bersama. GCB *Ciliwung Center*; pendekatan seni-budaya, budidaya tanaman, pengelolaan sampah, serta sekolah Sungai, konservasi, dan mitigasi banjir, bukan sekadar daftar kegiatan. Nilai analitisnya terletak pada perubahan hubungan warga terhadap sungai, di mana sungai dipahami sebagai ruang yang memiliki konsekuensi sosial bagi warga lain. Dalam kerangka Dobson (2003), praktik tersebut memperlihatkan pergeseran dari hak atas lingkungan menuju tanggung jawab atas dampak tindakan.



Gambar 2. Galeri Ciliwung di Kantor GCB

Pertama, *GCB Ciliwung Center*. Pusat tersebut berfungsi sebagai bentuk *environmental learning space* bagi masyarakat. Ruang belajar yang mencakup sejarah sungai, pengelolaan sampah, susur sungai, hidroponik, budidaya, fauna, dan budaya masyarakat Ciliwung. Pembelajaran tersebut memperlihatkan bahwa pengetahuan ekologis dibentuk melalui pengalaman sosial. Warga tidak ditempatkan sebagai penerima informasi, tetapi sebagai pelaku yang menghubungkan pengetahuan sungai pada kebiasaan dan tindakan. Posisi ini sejalan pada gagasan *ecological citizenship* sebagai praktik yang berangkat dari kehidupan sehari-hari (Dobson, 2003; Jagers, 2009).

Kedua, pendekatan seni dan budaya bekerja sebagai bentuk kewarganegaraan ekologis. Seminar lingkungan, festival Ciliwung, Gerbang Biru Ciliwung, bazar UMKM, dan mural membawa persoalan sungai ke ruang sosial dan pertemuan sehari-hari. Seni budaya tidak sekadar menjadi media penyampaian pesan, tetapi menjadi cara warga membangun hubungan simbolik dan emosional terhadap sungai. Melalui ruang tersebut, isu ekologis hadir sebagai bagian dari pengalaman kewargaan, bukan sebagai isu teknis yang hanya dibahas oleh lembaga lingkungan.



Gambar 3. Mural Sungai Ciliwung sebagai Bentuk Gerakan Komunitas GCB

Ketiga, program budidaya tanaman di bantaran Ciliwung menunjukkan memperlihatkan etika ekologis melalui pengelolaan ruang bersama. Kelompok Tani Mandiri Indah Tani Petamburan mengelola lahan yang semula sekitar 3.500 m² dan kemudian tersisa sekitar 1.000 m². Berbagai tanaman hortikultura, bonsai, dan tanaman lain dikembangkan sebagai kegiatan produktif sekaligus kegiatan lingkungan. Informan memandang lahan tersebut sebagai milik bersama dan menggunakannya bagi kegiatan yang memiliki nilai guna. Temuan tersebut memperlihatkan tanggung jawab ekologis berlangsung melalui kerja rutin, penggunaan ruang, dan keputusan sehari-hari, bukan hanya melalui kegiatan kampanye.

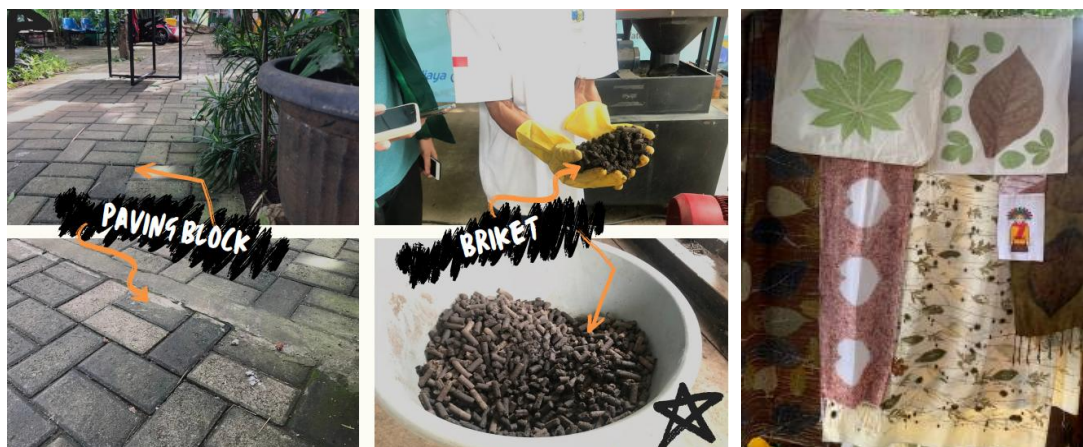


Gambar 4. Pelestarian Alam dengan Budidaya Tanaman dan Hidroponik di GCB

Praktik budidaya tanaman memperlihatkan hubungan antara kewarganegaraan ekologis dan pengelolaan sumber daya bersama. Ruang hijau, budidaya tanaman, produk tanaman, dan aktivitas ekonomi lokal menjadi bagian dari hubungan sosial masyarakat terhadap bantaran sungai. Ostrom (1990) menunjukkan pentingnya pada aturan, kepatuhan, hubungan sosial, dan pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya bersama. Dalam konteks GCB, tindakan tersebut menjadi bentuk kewarganegaraan karena warga mengambil tanggung jawab langsung atas ruang yang dipakai bersama.

Keempat, pengelolaan limbah sampah DAS Ciliwung memperlihatkan dimensi tindakan kolektif ekologis. GCB, PLN, Indonesia Power, dan masyarakat sekitar terlibat dalam pengumpulan sampah, pengolahan, pendidikan lingkungan, dan pengembangan Bank Sampah. Sampah diolah menjadi pot tanaman, *paving block*, briket, dan *ecoprint*. Pembagian peran tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab ekologis dapat bergerak dari tindakan rumah tangga menuju kerja bersama. Pada titik tersebut, *ecological citizenship* bertemu *civic engagement*, di mana kewajiban individual memperoleh bentuk sosial melalui organisasi dan kerja kolektif.

Pada tingkat sehari-hari, pemilahan, pengeringan, pengolahan, dan penggunaan kembali sampah menjadi tindakan kewarganegaraan. *Ecoprint*, misalnya, menghubungkan pemanfaatan bahan alam pada kegiatan produktif. Nilai kewargaan terletak pada perubahan hubungan terhadap sampah, dari benda yang dibuang menjadi persoalan yang harus dipertanggungjawabkan. Temuan ini memperlihatkan alasan *ecological citizenship* tidak dapat dipisahkan dari ranah privat. Tindakan sehari-hari memiliki konsekuensi publik ketika sampah berakhir di sungai atau ketika pengelolaannya mengurangi beban lingkungan.



Gambar 5. Beberapa Hasil dari Pengolah Sampah di GCB

Temuan lapangan juga menunjukkan perubahan perilaku masyarakat. Informan menyatakan bahwa sebagian masyarakat yang sebelumnya membuang sampah langsung ke sungai mulai menyerahkan sampah kepada GCB. Temuan ini belum dapat dibaca sebagai perubahan seluruh masyarakat Ciliwung, tetapi menunjukkan adanya pergeseran pada praktik sebagian warga. Dalam kerangka Dobson (2003), pergeseran tersebut penting karena tanggung jawab ekologis hadir melalui tindakan yang tidak selalu menghasilkan manfaat langsung bagi pelaku.

Kelima, sekolah sungai, konservasi, dan mitigasi banjir memperluas tindakan kolektif dari pengelolaan sampah menuju perlindungan keselamatan bersama. Program Sekolah Sungai diarahkan kepada siswa sekolah dasar, sekolah menengah, dan masyarakat, berisi pengetahuan sungai, kepedulian lingkungan, serta keterlibatan warga. Pendidikan tersebut memberi ruang bagi proses belajar kewarganegaraan ekologis berbasis pengalaman karena peserta berhadapan langsung pada persoalan sungai dan kebutuhan tindakan bersama.

Program Sekolah Sungai juga berkaitan pada risiko banjir yang memperlihatkan hubungan antara posisi ekologis dan kewarganegaraan. Paramitha et al. (2020) menunjukkan hubungan pertumbuhan penduduk, kepadatan permukiman, berkurangnya ruang terbuka hijau, dan pembangunan sepanjang DAS terhadap risiko banjir Ciliwung. Dalam konteks GCB, pengetahuan risiko diterjemahkan menjadi kesiapsiagaan. Warga belajar mengenali kondisi sungai, memahami risiko, dan mengambil bagian dalam tindakan bersama. Kewarganegaraan ekologis pada titik ini berkaitan pada tanggung jawab terhadap keselamatan warga lain, termasuk warga yang tidak hadir dalam kegiatan komunitas.

GCB juga terlibat dalam evakuasi banjir, menyediakan perahu dan mesin penyedot air, serta melakukan kegiatan konservasi. Konservasi flora diarahkan pada tanaman seperti sengon dan bambu, sedangkan konservasi fauna berkaitan pada biota asli Ciliwung. Program Tas Siaga disiapkan bagi kebutuhan warga saat bencana. Kegiatan tersebut menunjukkan bentuk kewarganegaraan partisipatif yang hadir melalui kesiapsiagaan, kerja sukarela, dan tanggung jawab terhadap keselamatan warga lain.

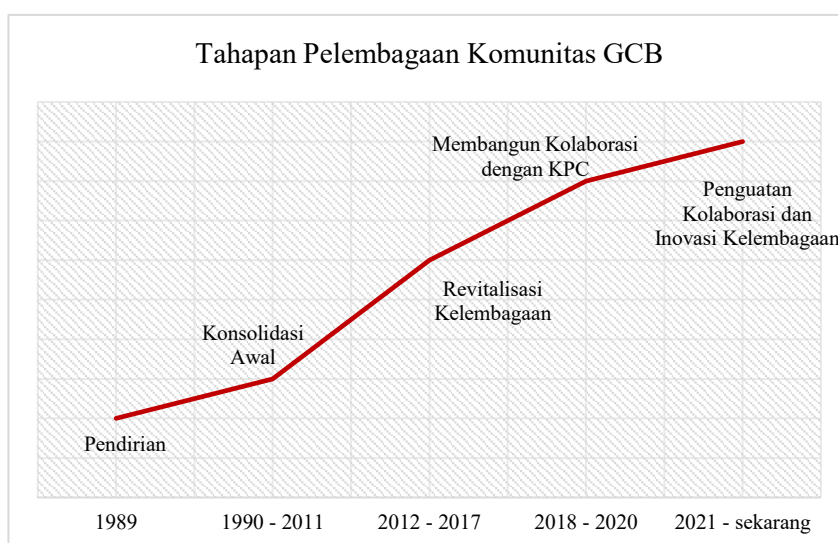
Ekowisata dan eduwisata menjadi ruang lain bagi tindakan kolektif. GCB memiliki tiga paket wisata, yaitu Bogor-Depok, Depok-Lenteng Agung, dan Manggarai-Petamburan. Paket Bogor-Depok dan Depok-Lenteng Agung diarahkan pada pengalaman konservasi, sedangkan kawasan Manggarai-Petamburan lebih diarahkan pada edukasi pengolahan sampah. Kegiatan tersebut menghubungkan pengetahuan lingkungan, pengalaman warga, ekonomi lokal, dan komunikasi publik melalui media digital (Anindhita et al., 2022).



Gambar 6. Peluncuran Sekolah Sungai di GCB

Rangkaian temuan menunjukkan tiga ciri utama *everyday ecological citizenship* di GCB. Pertama, etika ekologis hadir melalui perubahan kebiasaan dan cara warga memandang sungai. Kedua, tindakan kolektif terbentuk melalui jaringan KPC, pendidikan, pengelolaan sampah, konservasi, dan kesiapsiagaan. Ketiga, tindakan tersebut mengubah penggunaan ruang dan hubungan sosial pada bantaran sungai. Dengan demikian, GCB tidak tepat dibaca sebagai kumpulan program. Ia merupakan arena tempat tindakan sehari-hari memperoleh bentuk kolektif dan orientasi publik.

Pelebagaan GCB merepresentasikan praktik sosial kewarganegaraan ekologis. Hasil penelitian mengidentifikasi lima tahap, yaitu pendirian pada 1989, konsolidasi awal 1990–2011, revitalisasi kelembagaan 2012–2017, pembangunan kolaborasi bersama KPC pada 2018–2020, serta penguatan kolaborasi dan inovasi kelembagaan sejak 2021 hingga sekarang. Lima tahap tersebut menunjukkan praktik ekologis menjadi lebih bertahan ketika memperoleh ruang organisasi, jaringan komunitas, praktik berulang, serta hubungan lintas sektor. Proses ini juga memperlihatkan pertemuan antara pola *top-down* dan *bottom-up*.



Gambar 6. Pelebagaan Komunitas GCB

Tahap pendirian memperlihatkan masuknya isu ekologis ke dalam ruang kelembagaan. GCB lahir dari pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, komunitas peduli lingkungan, dan pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap Ciliwung. Visi, misi, dan program pendidikan lingkungan dirumuskan melalui kajian, diskusi, serta seminar. Tahap ini dapat dibaca sebagai jalur *top-down* karena institusi menyediakan ruang organisasi, sumber daya, dan legitimasi awal. Namun, keberlanjutan gerakan tetap bergantung pada tindakan komunitas.

Tahap konsolidasi awal 1990–2011 menunjukkan perluasan basis partisipasi. GCB menghubungkan berbagai pemangku kepentingan, melakukan kampanye publik, serta mengajak dunia usaha dan industri berpartisipasi pada pelestarian sungai. Jaringan, norma, kepercayaan, dan hubungan timbal balik dapat menjadi dasar tindakan kolektif (Pretty, 2003; Pretty & Ward, 2001). Pada tahap ini, prakarsa kelembagaan mulai memperoleh isi sosial melalui hubungan antarwarga dan antarkomunitas. Jadi, pelebagaan tidak bergerak satu arah dari lembaga menuju warga.

Tahap revitalisasi pada 2012–2017 menjadi titik pembaruan kelembagaan setelah pencapaian sebelumnya dinilai belum optimal. Revitalisasi diarahkan pada penyatuan upaya berbagai pihak menuju Ciliwung yang bersih. Dalam perspektif *ecological citizenship*, tahap ini penting karena organisasi perlu mengikuti pengalaman komunitas dan perubahan persoalan ekologis. GCB mulai bergeser dari organisasi penggagas menuju rumah bersama yang memberi ruang lebih luas bagi komunitas.

Tahap pembangunan kolaborasi bersama KPC pada 2018–2020 menjadi perubahan penting pada posisi GCB. GCB mulai berfungsi sebagai simpul jejaring – rumah bersama KPC dari hulu

Bogor hingga hilir Jakarta. Pola tersebut sejalan pada *collaborative governance* ketika aktor pemerintah dan nonpemerintah bekerja pada ruang bersama (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012). Tetapi temuan GCB menunjukkan bahwa kolaborasi juga mempunyai sisi kewarganegaraan yakni warga memperoleh ruang untuk bertindak, menyampaikan pengetahuan lokal, dan mempertahankan identitas komunitas.

Terakhir, tahap penguatan kolaborasi dan inovasi kelembagaan sejak 2021 hingga sekarang menunjukkan keberlanjutan praktik sosial kewarganegaraan ekologis melalui pengembangan kapasitas KPC. GCB tidak menyeragamkan kegiatan. KPC Bogor melakukan kegiatan bersih sungai secara rutin; Sahabat Sungai Depok bergerak pada edukasi *water rescue*, *rafting*, dan susur sungai; KPC Lenteng Agung mengembangkan susur sungai, taman, kerajinan, dan *ecoprint*; KPC Pejaten mengembangkan Sekolah Sungai; Jawara Peci Condet mengolah sampah anorganik menjadi produk kreatif; sedangkan Mat Peci menjalankan kegiatan bersih sungai, penghijauan bantaran, konservasi, serta penyediaan bibit dan tempat sampah.

Dari keseluruhan temuan, pelebagaan GCB dapat dipahami sebagai proses artikulasi antara prakarsa kelembagaan dan otonomi komunitas. Pada tahap awal, lembaga menyediakan ruang; pada tahap berikutnya, jaringan sosial memperluas partisipasi; revitalisasi mengubah bentuk organisasi; kolaborasi melahirkan rumah bersama 36 KPC; dan tahap berikutnya mengembangkan inovasi berbasis komunitas. *Ecological citizenship* menjadi lebih stabil ketika praktik sehari-hari memperoleh dukungan organisasi tanpa kehilangan kemampuan komunitas untuk menentukan bentuk tindakan sesuai kondisi lokal.

Simpulan

Penelitian menunjukkan bahwa GCB berkembang dari organisasi lingkungan lintas sektor menjadi rumah bersama bagi 36 Komunitas Peduli Ciliwung (KPC) yang menghubungkan warga, pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Praktik sosial kewarganegaraan ekologis hadir melalui *GCB Ciliwung Center*, pendekatan seni-budaya, program budidaya tanaman, pengelolaan limbah sampah, serta sekolah sungai, konservasi, dan mitigasi banjir. Proses pelebagaan berlangsung melalui lima tahap, yaitu pendirian, konsolidasi, revitalisasi, pembangunan kolaborasi bersama KPC, serta penguatan kolaborasi dan inovasi kelembagaan. GCB berperan sebagai simpul jaringan, sedangkan KPC mempertahankan ruang aksi sesuai kondisi lokal sehingga terbentuk hubungan *top-down* dan *bottom-up* dalam pelebagaan kewarganegaraan ekologis. Secara teoretis, temuan tersebut memperlihatkan bahwa *ecological citizenship* bukan sekadar partisipasi warga dalam kegiatan lingkungan, melainkan praktik sosial sehari-hari yang menghubungkan tanggung jawab ekologis, tindakan kolektif, kepedulian terhadap ruang hidup bersama, dan konsekuensi publik dari tindakan individual. Secara kebijakan, keberlanjutan gerakan perlu diarahkan pada pengakuan terhadap KPC sebagai mitra pengelolaan DAS Ciliwung, pengembangan pendidikan kewarganegaraan ekologis berbasis komunitas, dokumentasi pengetahuan lokal, forum koordinasi hulu-tengah-hilir, serta pemetaan program dan dukungan sumber daya secara terbuka agar praktik kewarganegaraan ekologis dapat berkembang secara berkelanjutan.

Referensi

- Adler, R. P., & Goggin, J. (2005). What do we mean by “civic engagement”? *Journal of transformative education*, 3(3), 236-253. <https://doi.org/10.1177/1541344605276792>
- Alfian, F., & Vitaloka, D. (2018). Strategi kerjasama antar daerah dalam penanganan sumber daya air (Studi kasus Sungai Ciliwung). *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 3(1), 55-70. <https://doi.org/10.24905/jip.3.1.2018.55-70>.
- Anindhita, W., Sari, E., Ariana, D., & Rahmawati, D. (2022). Media Promosi Bisnis Wisata Susur Sungai melalui Pelatihan Teknologi Media Digital untuk Masyarakat Binaan di Ciliwung DKI Jakarta. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 6(1), 94-100. <https://doi.org/10.22437/jkam.v6i1.19377>.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.

- Clegg, G., Haigh, R., Amaratunga, D., & Rahayu, H. P. (2023). Coordination Challenges Facing Effective Flood Governance in the Ciliwung River Basin. In: Triyanti, A., Indrawan, M., Nurhidayah, L., Marfai, M.A. (eds) *Environmental Governance in Indonesia. Environment & Policy*, vol 61. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15904-6_17.
- Cordova, M. R., Kelly, M. R., Hafizt, M., Wibowo, S. P. A., Ulumuddin, Y. I., Purbonegoro, T., Yogaswara, D., Kaisupy, M. T., Subandi, R., Sani, S. Y., Thompson, R. C., & Jobling, S. (2024). From riverbank to the sea: An initial assessment of plastic pollution along the Ciliwung River, Indonesia. *Marine Pollution Bulletin*, 206, 116662. DOI: [10.1016/j.marpolbul.2024.116662](https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2024.116662).
- Creswell, J.W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. London: Sage Publications.
- Della Porta, D., & Diani, M., (2006). *Social Movements: an introduction (2nd ed.)*. New Jersey, U.S.A: Wiley-Blackwell.
- Denzin, NK., & Lincoln, YS. (2005). Introduction: The Discipline and Practice of Qualitative Research. In: Denzin, N.K. and Lincoln, Y. S., Eds., *Handbook of Qualitative Research, 3rd Edition*. London: Sage Publications, Inc.
- Dobson, A. (2003). *Citizenship and the environment*. Oxford University Press.
- Dobson, A. (2006). Ecological citizenship: A defence. *Environmental politics*, 15(03), 447-451. <https://doi.org/10.1080/09644010600627766>.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of public administration research and theory*, 22(1), 1-29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>.
- Hidayaturahmi, Lubis, D. P., Adiwibowo, S., & Kartodihardjo, H. (2023). Gerakan sosial komunitas Ciliwung Depok dalam Ciliwung Lestari: Sebuah tinjauan dari perspektif komunikasi pembangunan. *Jurnal Good Governance*, 19(1), 92–106. <https://doi.org/10.32834/gg.v19i1.587>.
- Hidayaturahmi, Lubis, D. P., Adiwibowo, S., & Kartodihardjo, H. (2024). Development communication in the Ciliwung Bersih movement. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 10(1), 158–169. <https://doi.org/10.29210/020242403>.
- Indiarto, S. (2000). *Kajian Hidrologi Daerah aliran sungai Ciliwung Menggunakan Model HEC1*. (Unpublished Master's Thesis) Program Pascasarjana IPB University, Bogor, Indonesia.
- Ishihara, H., & Pascual, U. (2009). Social capital in community level environmental governance: A critique. *Ecological Economics*, 68(5), 1549-1562. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2008.11.003>.
- Isin, E. F. (2008). Theorizing acts of citizenship. In Isin, E. F. & Nielsen G. M. (Eds.), *Acts of citizenship* (pp. 15–43). London, UK: Palgrave Macmillan.
- Jagers, S. C. (2009). In search of the ecological citizen. *Environmental Politics*, 18(1), 18–36. <https://doi.org/10.1080/09644010802624751>.
- Kementerian Lingkungan Hidup RI. (2012). *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2012. Pilar Lingkungan Hidup Indonesia*. Jakarta: KLH.
- Maring, P., Hasugian, F., & Kaligis, R. A. (2015). Social Strategy of Ciliwung River Bank Community. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 7(1), 102-111. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v7i1.3600>.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.)*. Sage Publications.
- Moerpratomo, P.S. (2022). *Laporan Kegiatan dan Evaluasi Gerakan Ciliwung Bersih*. Jakarta: Sekretariat GCB.
- Mohammad, H., & Dhestyana, D.T. (2022). Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Dalam Mewujudkan “Sport and Tourism” Sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 21(2), 59–71. Retrieved from <https://ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/18>.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action* (Vol. 10). Cambridge: Cambridge university press.
- Paramitha, P. P., Tambunan, R. P., & Indra, T. L. (2020). Kajian pengurangan risiko bencana banjir di DAS Ciliwung. *IJEEM-Indonesian Journal of Environmental Education and Management*, 5(2), 100-124. <https://doi.org/10.21009/IJEEM.052.01>.
- Patton, MQ. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th

- Edition). Sage Publications.
- Pratama, M. A., & Constantine, D. M. (2023). A Spatiotemporal Analysis of Organic Pollutants Contamination in Ciliwung River, Indonesia. *CSID Journal of Infrastructure Development*, 6(2), 198-210. <https://doi.org/10.7454/jid.v6.i2.1119>.
- Pretty, J. (2003). Social capital and the collective management of resources. *science*, 302(5652), 1912-1914. DOI: 10.1126/science.1090847.
- Pretty, J., & Ward, H. (2001). Social capital and the environment. *World development*, 29(2), 209-227. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(00\)00098-X](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(00)00098-X).
- Puspita, I. J., Suharjito, D., & Supriyanto, B. (2024). Social Capital in Collective Action on Water Resources Management in Buleleng, Bali, Indonesia. *Journal of Natural Resources & Environment Management/Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 14(1), 66-75. <https://doi.org/10.29244/jpsl.14.1.66-75>.
- Puspitasari, R. L., Elfidasari, D., Aulunia, R., & Ariani, F. (2016). Studi kualitas air sungai Ciliwung berdasarkan bakteri indikator pencemaran pasca kegiatan bersih Ciliwung 2015. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Sains dan Teknologi*, 3(3), 156–162. <https://doi.org/10.36722/sst.v3i3.222>.
- Rahmawati, N. S. (2019). *Hubungan Penggunaan Media Sosial dengan Partisipasi Anggota Komunitas dalam Melakukan Gerakan Sosial Lingkungan*. (Unpublished Undergraduate Thesis) IPB University, Bogor, Indonesia.
- Ramadhani, R.W. (2021). *Mewujudkan Gerakan Lingkungan dari Selatan Jakarta (Studi Kasus: Komunitas Masyarakat Peduli Ciliwung dan Lingkungan Hidup)*. (Unpublished Undergraduate Thesis) S1 Antropologi Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.
- Ramandhana, N. (2012). *Analisis gerakan penyelamatan Sungai Ciliwung: Kasus dua komunitas pegiat lingkungan di Kabupaten Bogor dan Kotamadya Jakarta Timur*. (Unpublished Undergraduate Thesis) IPB University, Bogor, Indonesia.
- Savitri, P.M. (2024). Peci, Sang Penjaga Lingkungan Sungai Melalui Pendidikan, Pemberdayaan dan Nilai Moral: Sebuah Studi Literatur. *SEGARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 65-69. <https://doi.org/10.33533/segara.v1i2.7325>.
- Schlosberg, D. (2007). *Defining environmental justice: Theories, movements, and nature*. Oxford University Press.
- Triwibowo, D., & Sujatmiko, I. G. (2006). *Gerakan Sosial: Wahana civil society bagi demokratisasi*. Jakarta: LP3ES.
- Wasis, B. dan Erizal. (2013). *Rencana Pengelolaan Das Terpadu (RPDAST) DAS Ciliwung*. Paper disampaikan dalam *Focus Group Discussion (FGD) Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAST) DAS Ciliwung*, November. <https://www.researchgate.net/publication/338159435>.
- Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). What kind of citizen? The politics of educating for democracy. *American educational research journal*, 41(2), 237-269. <https://doi.org/10.3102/00028312041002237>.